

## EVALUASI AKUNTABILITAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN GUNA Mendukung INOVASI RSUD. Dr. ISKAK TULUNGAGUNG

**Rachmad Gesah Mukti Prabowo**

*Universitas Tulungagung*

[r.gesah.mp@gmail.com](mailto:r.gesah.mp@gmail.com)

### ABSTACT

*The main purpose of this study is to explain the accountability of planned activities and budgets at General Hospital Dr. Iskak Tulungagung and its relationship with innovations and programs implemented at the hospital. This research use descriptive qualitative approach. The results obtained from this study are that work plan and budget accountability has a positive impact on hospital managerial and operational performance. All forms of innovation and programs implemented by hospitals cannot be separated from adequate planning and budgeting support.*

**Keywords:** *Accountability, Work Plan and Budget, Innovation and Program*

### LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung merupakan sebuah rumah sakit tipe B yang memiliki prestasi tingkat internasional yang belum pernah diraih oleh mayoritas rumah sakit tipe A yang berada di Indonesia yaitu terpilih sebagai rumah sakit terbaik versi International Hospital Federation (IHF) Congress and Award ke - 43 yang diselenggarakan di Oman, Uni Emirat Arab tahun 2019 ini dalam hal penyelenggaraan layanan publik.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung menerapkan *The New Concept Hospital Management Combined With PSC (Public Safety Centre)* yang

merupakan program biaya murah namun dengan kualitas terbaik (*low cost high quality*) yang sulit untuk ditiru oleh rumah sakit lainnya. Program ini membutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal termasuk pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung secara umum. Program ini berjalan dengan cara apabila ada kelebihan yang dimiliki salah satu unit, akan dipergunakan untuk menutup unit lain yang kekurangan. Bahkan menurut direktur RSUD Dr. Iskak Tulungagung dr. Supriyanto Dharmoredjo, Sp.B, FINACS, M.Kes bahwa perubahan pola pembiayaan terhadap layanan kesehatan dari mandiri ke jaminan kesehatan

nasional (JKN) sama sekali tidak mengganggu layanan bagi pasien dimana hal tersebut bertolak belakang dengan kondisi banyak rumah sakit di Indonesia dimana banyak rumah sakit di Indonesia yang menolak melayani pasien yang memanfaatkan jaminan kesehatan nasional sehingga memaksa kementerian kesehatan sebagai otoritas kesehatan tertinggi di Indonesia mengeluarkan aturan yang akan mencabut ijin rumah sakit yang menolak pasien kondisi darurat dengan jaminan kesehatan nasional. Hal ini yang menjadikan pentingnya dilakukan penelitian terkait kondisi tersebut.

Untuk mewujudkan inovasi yang dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung tersebut tentunya membutuhkan perencanaan yang baik dan dukungan anggaran yang memadai pula.

Perencanaan merupakan salah satu proses yang terpenting didalam operasi organisasi, karena merupakan panduan arah pelaksanaan aktivitas kerja organisasi. Anggaran menunjukkan perolehan dan penggunaan sumber-sumber organisasi dalam kurun waktu tertentu (Yulyani, 2016)

Dengan adanya akuntabilitas, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada pimpinan yang berada di bawahnya dengan lebih efisien tanpa perlu memantau secara terus menerus aktivitas operasi organisasi (Asa'd, 2017).

Berdasarkan penelitian pada kebijakan perencanaan dan

penganggaran di Kabupaten Solok Selatan menyebutkan bahwa masih belum adanya kesinkronan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya mulai dari dokumen perencanaan hingga penganggaran, beberapa program dan kegiatan yang muncul tiba-tiba dalam dokumen anggaran begitu pula sebaliknya demikian pula kualitas kegiatan yang masih rendah dan target kegiatan yang tidak dapat diukur. (Hanida dkk., 2015). Sedangkan penelitian yang terkait penerapan *Performance Based Budgeting* terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Bengkulu menghasilkan perencanaan anggaran memiliki dampak negatif terhadap akuntabilitas kinerja lembaga publik, serta pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja lembaga publik (Aprila dan Melfariza, 2014). Dan juga penelitian terkait akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran partisipasi penganggaran pada kinerja manajerial pada SKPD kota Denpasar memiliki hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial sedangkan partisipasi anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial pada SKPD di Kota Denpasar (Wianti dan Sisdyanti, 2016). Peneliti lain juga mengungkapkan bahwa perlunya pengembangan akuntabilitas kegiatan organisasi sektor publik

dan pemerintahan (Fedosov dan Paientko, 2018).

Masalah perencanaan, pengelolaan keuangan dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati. Pengelolaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi program kegiatan pelayanan pasien di rumah sakit, oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung harus menetapkan target belanjanya untuk mendukung inovasi atau program yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan akuntabilitas dari rencana kegiatan dan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung dan hubungannya dengan inovasi dan program yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan terkait akuntabilitas organisasi sektor publik terhadap pengelolaan rencana kerja dan anggaran, serta sebagai tambahan pengetahuan terkait kesesuaian rencana kerja dan anggaran terhadap inovasi dan program yang dilaksanakan pada organisasi sektor publik terutama rumah sakit sehingga dapat memberikan gambaran terkait upaya pencapaian prestasi yang sudah diperoleh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung.

## TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi (*organizational goal*), merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan merumuskan serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi (Yulyani, 2016). Perencanaan tersebut dapat direalisasikan dengan adanya dukungan dari anggaran yang memadai, yaitu suatu rencana keuangan periodik tertulis yang disusun berdasarkan program kegiatan organisasi yang telah disahkan mengenai aktivitas dan kebutuhan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan moneter dalam jangka waktu tertentu (Yulyani, 2016). Proses perencanaan dan penganggaran merupakan langkah yang harus dilaksanakan dalam penggunaan dana organisasi (Hanida dkk., 2015).

Anggaran disusun secara sistematis yang meliputi keseluruhan aktivitas organisasi yang dinyatakan dalam satuan moneter dalam jangka waktu periode tertentu (Aprila dan Melfariza, 2014). Salah satu karakteristik system anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan dan pencapaian anggaran tersebut (Wianti dan Sisdyani, 2016).

Kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah pelaksana

anggaran atau instansi/lembaga sektor publik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas instansi/lembaga sektor publik dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang pada akhirnya dapat menjadi sebuah kebutuhan yang penting dalam pengelolaan keuangan, terlebih dalam hal mencapai akuntabilitas pada instansi/lembaga sektor publik (Wianti dan Sisdyani, 2016).

Ada hubungan antara akuntansi keuangan pemerintah, pelaporan dan akuntabilitas. Pertama, organisasi akuntansi dan pelaporan dalam format tunggal memungkinkan pengguna untuk membandingkan informasi tentang berbagai negara. Kedua, pengenalan standar akuntansi keuangan internasional secara simultan di sektor publik dan swasta memungkinkan pengguna untuk memberikan informasi yang lebih andal dan mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Ketiga, hubungan antara akuntansi dan akuntabilitas disediakan oleh kemampuan untuk memeriksa silang organisasi publik dan swasta untuk mengidentifikasi konflik kepentingan dan risiko korupsi. Bahkan, akuntansi keuangan yang memberikan informasi yang benar untuk pelaporan keuangan memungkinkan memastikan kontrol publik yang konstan atas keadaan keuangan pemerintah, tetapi dalam hal ini laporan keuangan harus dipublikasikan secara berkala (Fedosov dan Paientko, 2018).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku (Gunawan, 2016). Akuntabilitas merupakan prinsip *good governance* yang diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi (Agustiani dan Nahariah, 2015) dan untuk membentuk akuntabilitas organisasi yang baik diperlukan kinerja manajerial yang baik (Wianti dan Sisdyani, 2016).

Akuntabilitas keuangan pemerintah (atau publik) berarti menjaga agar warga mendapat informasi tentang posisi keuangan kota, kinerja keuangan, upaya pelayanan, dan penyelesaian. Informasi transparan tentang kegiatan pemerintah tidak hanya merupakan salah satu tanda dari masyarakat yang demokratis, tetapi juga merupakan syarat utama keberhasilan pembangunannya (Fedosov dan Paientko, 2018). Pertanggungjawaban keuangan pemerintah diwujudkan kedalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas (Kemenkumham, 2019).

Dewasa ini masyarakat tidak tertarik untuk mengetahui jumlah total anggaran pemerintah, sebaliknya masyarakat lebih tertarik pada biaya kenaikan pendapatan pemerintah, efektivitas anggaran yang dihabiskan pemerintah, serta alternatif pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini

berarti akuntabilitas diperluas untuk mencakup keberhasilan yang dicapai dalam memastikan keberlanjutan ekonomi. Masyarakat akan menjadi puas ketika yakin bahwa kegiatan pemerintah meningkatkan kekuatan ekonomi dan bahwa keseimbangan keuangan masyarakat tidak terancam (Fedosov dan Paientko, 2018).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara luas terkait fenomena sosial tertentu (Yulyani, 2016). Pendekatan kualitatif berupaya memahami perilaku dan lembaga dengan memahami sebaik-baiknya orang-orang yang terlibat. Melalui pendekatan ini, peneliti akan memahami berbagai masalah yang terdapat dalam kelompok tersebut (Agustiani dan Nahariah, 2015).

Lokasi penelitian ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung adalah karena rumah sakit tersebut merupakan sebuah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berdasarkan aturannya memiliki otoritas pengelolaan keuangan mandiri serta memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja dan anggaran rumah sakit secara periodik (Kemendagri, 2018).

Metode wawancara dan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang

dipergunakan dalam penelitian ini dimana metode wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data berupa catatan, dokumen dan arsip yang ada baik data kualitatif maupun data kuantitatif (Wianti dan Sisdyani, 2016).

## HASIL PENELITIAN

Akuntansi Keuangan pemerintah merupakan kerangka kerja konseptual yang berguna dalam pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan pemerintah merupakan sumber informasi bagi masyarakat dengan syarat bahwa hasil dari akuntansi keuangan pemerintah tersebut adalah informasi yang akurat, transparan, dapat dipahami dan berguna bagi pengguna internal maupun eksternal (Fedosov dan Paientko, 2018).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban. Organisasi yang akuntabel merupakan organisasi yang punya kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialaminya termasuk kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakannya (Agustiani dan Nahariah, 2015). Berdasarkan hal tersebut, rumah sakit umum daerah Dr. Iskak Tulungagung dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan rencana kerja dan anggaran seluruh aspek kegiatan rumah sakit sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku (Kemenkumham, 2019).

Setiap akhir tahun / periode akuntansi, rumah sakit umum daerah Dr. Iskak Tulungagung menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) untuk tahun / periode berikutnya. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tersebut berisi mengenai gambaran umum organisasi, kinerja organisasi (keuangan maupun non keuangan), perencanaan bisnis beserta anggarannya (termasuk didalamnya berisi RKA) dan yang terakhir proyeksi keuangan.

#### Profil Keuangan RSUD Dr. Iskak Tulungagung

Secara umum penyusunan rencana kerja dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tersebut dirumuskan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta prospek perkembangan rumah sakit.

##### A. Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur serta dapat ditempuh untuk memperoleh tambahan dana.

**TABEL 1**  
**RASIO KEUANGAN**  
**RSUD Dr. ISKAK TAHUN 2017-2018**

NO	RASIO KEUANGAN	TAHUN		NAIK / TURUN	KET
		2017 (%)	2018 (%)		
1	Current Ratio	138,46	238,41	Naik	Baik
2	Quick Ratio	86,90	190,32	Naik	Baik
3	Cash Ratio	38,01	44,42	Naik	Baik
4	Return On Investment	20,51	18,00	Turun	Tidak Baik
5	Debt to Total Asset Ratio	11,56	10,68	Turun	Baik
6	Debt To Equity Ratio	88,43	89,32	Naik	Tidak Baik

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan dari current ratio dari 138,46% ditahun 2017 menjadi 238,41% ditahun 2018, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya dengan aktiva lancar yang dimilikinya juga semakin baik. Peningkatan pada quick ratio mengindikasikan bahwa kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya dengan aktiva lancar yang paling mendekati uang tunai yang dimilikinya juga semakin baik. Begitu juga pada cash ratio yang meningkat, hal ini berarti bahwa kemampuan rumah sakit dalam memenuhi kewajibannya dengan kas atau setara kas yang dimilikinya juga semakin baik. Return On Investment yang turun pada tahun 2018

dibanding tahun 2017 mengindikasikan bahwa kemampuan rumah sakit dalam pengembalian investasinya menurun. Pada penurunan debt ratio dari tahun 2017 ke tahun 2018 diketahui bahwa aktiva rumah sakit yang dibiayai oleh hutang juga menurun. Sedangkan kenaikan pada equity ratio di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017, mengindikasikan bahwa modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau hutang juga naik.

### B. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

SGR adalah rasio pertumbuhan pendapatan, merupakan indikator yang mengukur kinerja daya jual rumah sakit atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada masyarakat. Penilaian SGR untuk mengetahui tingkat pertumbuhan rumah sakit berdasar kenaikan pendapatan rumah sakit.

Pada tabel 2 dibawah, diketahui bahwa SGR tahun 2018 sebesar 11,68% yang berarti bahwa kinerja daya jual rumah sakit atas pelayannya sebesar 11,68% dan lebih rendah dibanding tahun 2017.

**TABEL 2**  
**SGR RSUD Dr. ISKAK TAHUN 2017-2018**

NO	TAHUN	PENDAPATAN	SGR (%)	KETERANGAN
1	2017	242.747.625.931,34	27,47	Naik
2	2018	271.121.690.037,10	11,68	Turun

Sumber: Data diolah, 2019

**C. Cost Recovery Rate**  
*Cost Recovery Rate (CRR)*, menunjukkan seberapa besar kemampuan Rumah Sakit menutup

biaya operasionalnya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*).

**TABEL 3**  
**CRR RSUD Dr. ISKAK TAHUN 2017-2018**

TAHUN	PENDAPATAN	BELANJA	CRR (%)	KETERANGAN
2017	242.747.625.931,34	222.731.075.280,00	108,98	Turun
2018	271.121.690.037,10	260.194.079.158,84	104,20	Turun

Sumber: Data diolah, 2019

Pada tabel 3 diatas, diketahui bahwa CRR rumah sakit tahun 2018 sebesar 104,20% yang berarti bahwa kemampuan Rumah Sakit menutup biaya operasionalnya (*Cost*) dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi pasien (*Revenue*) turun dibanding tahun 2017.

### D. Tingkat Kemandirian

Indikator ini menggambarkan capaian kemampuan Rumah Sakit untuk membiayai seluruh pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun investasi yang bersumber dana dari fungsional maupun APBD dengan pendapatan fungsional rumah sakit sendiri.

**TABEL 4**  
**TINGKAT KEMANDIRIAN**  
**RSUD Dr. ISKAK TAHUN 2017-2018**

TAHUN	PENDAPATAN	BELANJA	TK (%)	KETERANGAN
2017	242.747.625.931,34	222.731.075.280,00	85,41	Naik
2018	271.121.690.037,10	310.709.856.072,08	87,25	Naik

Sumber: Data diolah, 2019

Pada tabel 4 diatas, menggambarkan kemampuan Rumah Sakit untuk membiayai seluruh pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun

investasi yang bersumber dana dari fungsional maupun APBD dengan pendapatan fungsional rumah sakit sendiri yang meningkat dibanding tahun sebelumnya.

## Laporan Pertanggungjawaban

### Keuangan RSUD Dr. Iskak

#### Tulungagung

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung telah membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan rumah sakit selama satu periode.

Laporan pertanggungjawaban kinerja usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung periode anggaran tahun 2018 dapat dilihat bahwa:

- Realisasi pendapatan Rp. 271.121.690.037,10,- atau 108,45% dari anggaran sejumlah Rp. 250.000.000.000,00,- yang berarti bahwa meningkat sebesar Rp. 28.374.064.105,76,- dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 242.747.625.931,34,-
- Realisasi belanja Rp. 310.709.856.072,08,- atau 104,06% dari anggaran sejumlah Rp. 298.588.708.220,00,- yang berarti meningkat sebesar Rp. 25.937.160.406,96 dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 284.772.695.665,12,-
- Realisasi surplus/(defisit) Rp. (39.588.166.034,98,-) atau 81,48% dari anggaran sejumlah Rp.

(48.588.708.220,00,-) yang berarti turun sebesar Rp. (9.000.542.185,02,-) dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. (42.025.069.733,78,-).

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa laporan pertanggungjawaban di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung periode anggaran tahun 2018 telah cukup memadai. Pada kenyataannya kecil sekali kemungkinannya pendapatan dan biaya yang terjadi sama dengan yang dianggarkan karena adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah dan terdapat kemungkinan bahwa situasi dan kondisi tertentu tidak dapat diprediksikan sebelumnya.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung mengadopsi metode Kaizen yaitu metode penghematan, mengurangi prosedur yang tidak perlu dan sebagainya.

Defisitnya realisasi anggaran rumah sakit sebesar Rp. (39.588.166.034,98,-) dikarenakan belum terbayarkannya tagihan pembiayaan layanan kesehatan dari BPJS Tulungagung untuk periode tahun 2018. Namun hal ini tidak mempengaruhi dan tidak memberikan dampak negatif bagi pelayanan kesehatan bagi pasien karena inovasi program kebijakan rumah sakit yaitu apabila ada unit yang memiliki kelebihan anggaran dipergunakan untuk menutup kekurangan pada unit yang lain sehingga seluruh operasional rumah sakit dapat berjalan dengan lancar.

## Kebijakan Non Keuangan RSUD

### Dr. Iskak Tulungagung

Dalam mewujudkan *The New Concept Hospital Management Combined With PSC (Public Safety Centre)* yang merupakan program biaya murah namun dengan kualitas terbaik (*low cost high quality*), RSUD Dr. Iskak Tulungagung memberlakukan beberapa kebijakan antara lain:

- Pengendalian pemberian obat kepada pasien oleh dokter dimana pemberian resep obat harus sesuai dengan formularium Nasional (Fornas) yaitu obat-obat yang sudah di list oleh Kemenkes dan pemberian resepnya berpijak pada INACBGS (List penyakit dan apa obatnya), disini dokter tidak bisa seenaknya sendiri memberi resep obat, sehingga pengaruh detailer obat berkurang yang pada akhirnya harga obat bisa lebih murah. Termasuk pengendalian penggunaan obat anastesi dan antibiotik.
- Apabila ada pasien yang ditangani oleh lebih dari satu dokter, pemberian resepnya akan dikontrol oleh rumah sakit, untuk resep obat dari dua atau lebih dokter yang kandungannya sama walaupun berbeda merknya, akan diberikan satu saja, hal ini mengakibatkan jumlah nominal harga yang dibayarkan pasien untuk membeli obat dapat ditekan serta mencegah kelebihan dosis yang diberikan kepada pasien.
- Penyediaan obat-obatan di apotek rumah sakit juga menyesuaikan formularium Nasional (Fornas) tersebut baik secara kuantitas maupun kualitas dicukupi seluruhnya oleh rumah sakit, kebijakan yang dilakukan adalah bahwa seluruh dokter tidak boleh memberikan resep obat yang tidak ada di apotek rumah sakit, sehingga pasien tidak perlu membeli obat di apotek luar.

## KESIMPULAN

Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa akuntabilitas rencana kerja dan anggaran RSUD Dr. Iskak Tulungagung memiliki dampak yang positif bagi kinerja manajerial dan operasional rumah sakit. Segala bentuk inovasi dan program yang dilaksanakan oleh rumah sakit tidak terlepas dari perencanaan dan dukungan penganggaran yang memadai.

Penelitian ini hanya membahas secara deskriptif mengenai akuntabilitas dari rencana kerja dan anggaran rumah sakit serta hubungannya dengan inovasi dan program yang dilaksanakan, oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian baik focus penelitian maupun metode yang dipergunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustiani, & Nahariah. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan*

- Anggaran Tahun 2014-2015 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Bone* Agustiani Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bone Nahariah Sekolah Tinggi Agama Islam ( STAI ) Al – Furqan Makassar Abstrak PENDA. 4, 71-90.
- Aprila, N., & Melfariza. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*. 4.
- Asa'd. (2017). *Penerapan Akuntabilitas Anggaran Untuk Pengukuran*. 243-260.
- Fedosov, V., & Paientko, T. (2018). Government financial accountability: key problems and main trends in post-communist countries. *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, 2018(99 (155)), 25-40. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2930>
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72-102.
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Syamsurizaldi, S. (2015). the Analysis of Planning and Budgeting Policy for Making More Significant Local Government Planning Policy in Indonesia. *IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences*, 1(2), 287. <https://doi.org/10.18769/ijasos.81928>
- Kemendagri. (2018). Permendagri No. 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesia*, 10(2), 1-15.
- Kemenkumham. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Wianti, I., & Sisdyani, E. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasansasaran Anggaran Dan Partisipasianggaran Pada Kinerja Manajerial Di Skpd Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1428-1454.
- Yulyani, S. (2016). *Tinjauan Atas Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung*. Retrieved from [http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com\\_dbook&task=readonline&book\\_id=13650&page=73&chkhask=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component](http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhask=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component)